

Laporan Triwulan III Tahun 2020

**Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB)/
Indonesia Disaster Management Fund (IDMF)**



Juli - September, 2020

Daftar Isi

I-	LATAR BELAKANG.....	3
II-	TRANSISI IMDFF-DR MENJADI IDMF/PENGELOLAAN HIBAH PENANGGULANGAN BENCANA.....	7
III-	PENGELOLAAN DAN PENGUATAN SEKRETARIAT DI BNPB.....	12
IV-	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH IMDFF-DR.....	14
V-	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGELOLAAN HIBAH LAINNYA.....	19
VI-	KOORDINASI INTERNAL DAN PELAPORAN.....	20
VII-	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT UNTUK TRIWULAN IV-2020.....	24
VIII-	LAPORAN KEUANGAN PROYEK ENSURE TRIWULAN III TAHUN 2020 DALAM RANGKA Mendukung Kegiatan SEKRETARIAT IMDFF-DR.....	29

I- Latar Belakang

Triwulan III-2020 merupakan titik awal masa kerja Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB) atau Indonesia Disaster Management Fund (IDMF), dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana /Indonesia Disaster Management Fund (IDMF) telah diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020. Laporan pelaksanaan kegiatan IDMF/TK-PHPB pada Triwulan III (periode Juli – September) tahun 2020 secara garis besar adalah sebagai berikut ini:

1. Transisi IMDFF-DR menuju The Indonesia Disaster Management Fund

Proses transisi dan keputusan rapat (perdana) Tim Pengarah TK-PHPB pada tanggal 27 Agustus 2020;

2. Aspek Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat di BNPB

Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana sedang dalam penelaahan di BNPB;

3. Pengendalian Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR

Dukungan untuk Sekretariat di BNPB masih perlu dilanjutkan untuk membantu BNPB selaku Executing Agency dalam melaksanakan koordinasi, sinergi dan pelaporan karena belum tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya;

4. Koordinasi dan Fasilitasi Penerimaan Hibah Lainnya

Sesuai arahan Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana, rencana penerimaan hibah dari Pemerintah Qatar perlu segera diproses BNPB sedangkan rencana penerimaan hibah Pemerintah New Zealand belum direspon oleh BNPB.

Tabel berikut ini merupakan agenda kerja dan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai arahan Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana pada rapat perdana Tim Pengarah tanggal 27 Agustus 2020.

No	Agenda Kerja	2020				2021 Q1-Q4	Kementerian/ Lembaga
	Arahan Tim Pengarah	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan- Dec	Direktorat Terkait
1	Pembentukan dan penetapan personil Sekretariat TK-PHPB	□■■■	■■■■	□□□□	□□□□	□□□□	BNPB (Biroren, Biro HOKS, Dit.Terkait)
	Penyiapan Dukungan APBN tahun 2020	□□■■	■■■■	□□□□	□□□□	□□□□	BNPB (Biroren)
	Penetapan kriteria, peran dan mekanisme kerja personil sekretariat;	□□■■	■■■■	□□□□	□□□□	□□□□	BNPB (Biroren, Dit.Terkait) Bappenas (DTTP)
2	Pelaksanaan sosialisasi TK-PHPB kepada mitra pembangunan bilateral dan	□□□□	■■■■	□□□□	□□□□	①②③④	BNPB (Biroren, Biro HOKS, Dit.Terkait) Bappenas (DTTP, PLNB, PLNM)

No	Agenda Kerja	2020				2021 Q1-Q4	Kementerian/ Lembaga
	Arahan Tim Pengarah	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan- Dec	Direktorat Terkait
	multilateral, serta untuk K/L dan Pemda						
3	Percepatan pelaksanaan pemulihan pasca bencana di NTB dan Sulteng melalui Proyek PETRA KfW-UNDP;serta	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	①②③④	BNPB (Biroren, Dit.Terkait) Bappenas (DTTP)
	Proyek ENSURE-UNDP untuk penguatan Sekretariat TK-PHPB	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	□□□□	BNPB (Biroren, Dit.Terkait) Bappenas (DTTP)
4	Percepatan proses pipeline hibah Qatar (USD 5 Juta) untuk NTB dan Sulteng, serta	□□■■■	■■■■■	□□□□	□□□□	□□□□	BNPB (Biro HOKS, Dit.Terkait) Bappenas (PLNB)
	Hibah New Zealand (NZD 1,5juta) untuk kegiatan penguatan kapasitas di Sulteng;	□□■■■	■■■■■	□□□□	□□□□	□□□□	BNPB (Biro HOKS, Pusdiklat, Dit.Terkait) Bappenas (PLNB)

No	Agenda Kerja	2020				2021 Q1-Q4	Kementerian/ Lembaga
	Arahan Tim Pengarah	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan- Dec	Direktorat Terkait
5	Mobilisasi potensi sumber hibah sesuai mandat TK-PHPB; serta	□□□□	□□□□	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	①②③④	BNPB, Bappenas, Kemkeu, Mitra Pembangunan
	Konsolidasi hibah PB on-going;	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	①②③④	BNPB, Bappenas, Kemkeu
6	Penyusunan Rencana Kerja TA 2020; dan	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	Sekretariat PHPB
	Rencana Kerja TA 2021	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	①②③④	Sekretariat PHPB
7	Sinkronisasi fasilitas pembiayaan PB dengan Disaster Pooling Fund dan DRFI (disaster risk financing and insurance)	□ □ □ □	□ □ □ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	①②③④	BNPB (Biroren, Dit.Terkait) Kemkeu (BKF, DJPPR) Bappenas (DTTP, PLNB, PLNM)

II- Transisi IMDFF-DR menjadi IDMF/Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Kepala Biro Hukum Bappenas menyampaikan Nota Dinas No: 637/B.03.ND/08/2020 kepada Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan dan Kepala Biro Perencanaan Bappenas tentang penyampaian Salinan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB). Status pelaksanaan strategi perubahan IMDFF-DR menuju IDMF pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan aspek pendukung strategis adalah sebagai berikut:










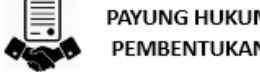

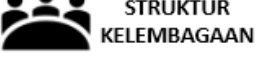


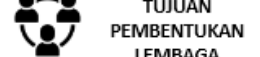




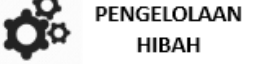


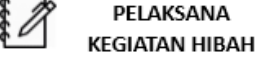


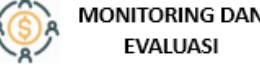

Aspek payung hukum	
MoU antara Pemerintah-United Nations dan World Bank tentang IMDFF-DR tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> IMDFF-DR adalah Instrumen Pendanaan yang dibentuk Pemerintah bersama United Nations dan World Bank untuk pengumpulan dan penyaluran hibah langsung pascabencana
Payung hukum Tim Koordinasi PHPB sebagai pengendali IDMF	<ul style="list-style-type: none"> IDMF adalah Instrumen Koordinasi pengelolaan hibah penanggulangan bencana Penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB)
Aspek Kelembagaan	
Organisasi Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana PHPB	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi Tim Koordinasi PHPB telah ditetapkan dalam SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB) Keanggotaan inti Tim Koordinasi PHPB terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, BNPB dan Kementerian Keuangan, didukung pejabat

	Eselon 1 dan Eselon 2 yang sesuai dengan bidang perencanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
Organisasi Sekretariat TK-PHPB	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Tim Koordinasi PHPB di BNPB belum terbentuk • Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi PHPB ditetapkan oleh BNPB berdasarkan fungsi dan peran kelembagaan yang ditetapkan dalam SK Tim Koordinasi PHPB
Aspek Pendanaan	
Aspek pendanaan	Sumber dan jenis pendanaan kegiatan Tim Koordinasi PHPB adalah APBN Bappenas, BNPB dan sumber lain yang syah.

Konsep IDMF adalah sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan instrumen kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Hibah Langsung maupun Hibah Terencana. Berkaitan dengan pengelolaan hibah langsung dan hibah terencana, mekanisme yang berlaku diantaranya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Pengelolaan Hibah Terencana maupun Hibah Langsung adalah proses reguler yang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, dengan focal point Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L calon penerima hibah. Peran BNPB dalam mekanisme reguler pengelolaan hibah penanggulangan bencana ini sesuai dengan fungsi BNPB yaitu: 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

IDMF tidak memiliki karakteristik sebagai Instrumen Pendanaan/Trust Fund yang dilengkapi dengan Trustee ataupun Kelembagaan Dana Perwalian serta Pengelola Dana Perwalian sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Perbandingan karakteristik IMDFF-DR dengan IDMF/PHPB dalam pengelolaan hibah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut ini:

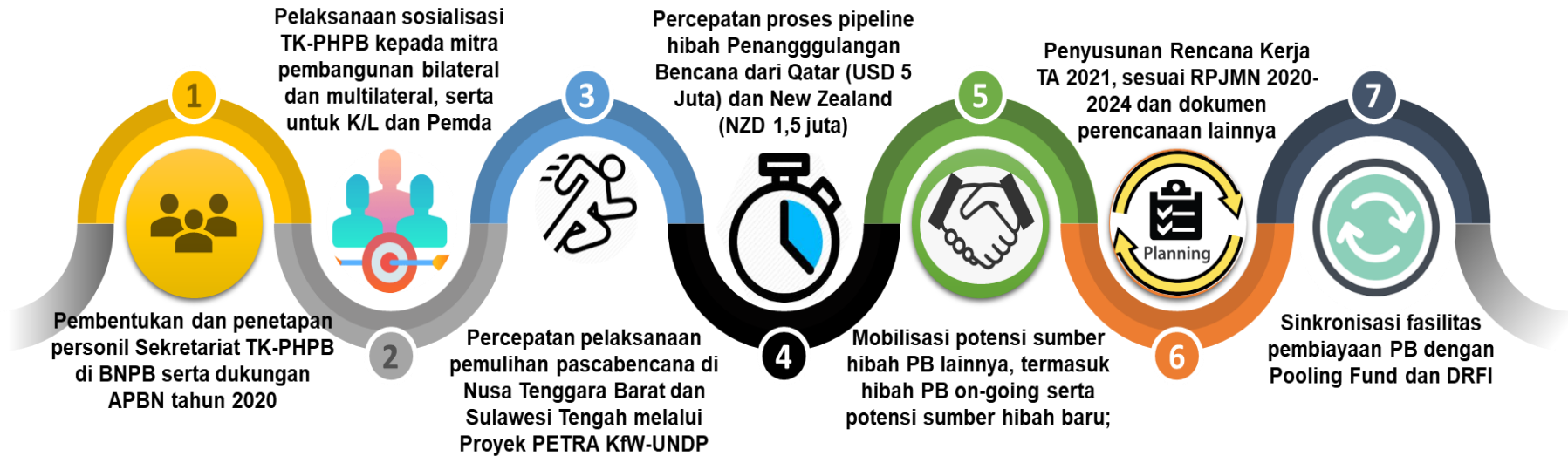
 PIC  IMDFF-DR <small>INDONESIA MULTI-DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER FACILITY</small>	 KARAKTERISTIK	 PIC  PHPB <small>INDONESIA MULTI-DONOR FUND MANAGEMENT FUND</small>
 <u>Hibah Langsung</u>	JENIS HIBAH 	 <u>Hibah Langsung dan Hibah Terencana</u>
 KEP MEN PPN; MoU Bappenas, UN, WB KEP SESTAMA BNPB	PAYUNG HUKUM PEMBENTUKAN 	KEPMEN PPN/ BAPPENAS; PERKA BNPB
 <u>Tim Pengarah dan Tim Teknis dari Unsur Pemerintah</u>	STRUKTUR KELEMBAGAAN 	 <u>Tim Pengarah dan Tim Teknis dari Unsur Pemerintah</u>
 <u>Sebagai Instrumen Pendanaan Hibah melalui Window UN dan Window WB</u>	TUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA 	 <u>Sebagai Instrumen Koordinasi Pengelolaan Hibah</u>
 di BNPB	SEKRETARIAT 	di BNPB
 <u>Penyaluran Hibah dengan mekanisme UN dan WB. Penatausahaan hibah sesuai peraturan yang berlaku</u>	PENGELOLAAN HIBAH 	 <u>Penyaluran hibah dari Donor dan penatausahaan hibah sesuai peraturan yang berlaku</u>
 <u>Pemerintah selaku Executing Agency bekerjasama dengan Implementing Partner</u>	PELAKSANA KEGIATAN HIBAH 	 <u>Pemerintah selaku Executing Agency bekerjasama dengan Implementing Partner</u>
 Executing Agency bersama Implementing Agency	MONITORING DAN EVALUASI 	 Executing Agency bersama Implementing Agency

Tim Pengarah TK-PHPB telah menyelenggarakan rapat perdana (virtual) Tim Pengarah pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan agenda utama sosialisasi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana. Rapat ini dihadiri unsur Bappenas, BNPB dan Kementerian Keuangan yang mewakili Tim Pengarah dan Tim Pelaksana TK-PHPB. Rangkuman isu/materi yang diusulkan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk fokus dan peran TK-PHPB, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Bappenas	Kementerian Keuangan	BNPB
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pemanfaatan IDMF/TK-PHPB untuk membantu penanggulangan bencana lainnya, termasuk inisiatif untuk penanggulangan bencana non-alam; • Mendukung sinergi pelaksanaan sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial dan ketahanan terhadap bencana; • Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan hibah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pendanaan bilateral dan multilateral untuk penanggulangan bencana sangat banyak, IDMF/TK-PHPBN perlu berperan dalam percepatan pemanfaatan hibah supaya dampak bencana dapat segera ditanggulangi; • IDMF/TK-PHPB berkontribusi dalam perbaikan data pemerintah daerah yang akan bermanfaat bagi penanggulangan bencana alam dan non-alam; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pemanfaatan IDMF/TK-PHPB untuk membantu penanganan Covid 19; • Perlu dilakukan terobosan untuk percepatan pemanfaatan hibah pada saat pandemi • Hibah dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terdampak bencana

No	Bappenas	Kementerian Keuangan	BNPB
	<p>dengan RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran strategis Kedeputian Pendanaan Bappenas sebagai <i>gate keeper</i> penerimaan bantuan internasional; • Kegiatan sosialisasi/resmob, akan didukung oleh Kedeputian Pendanaan Bappenas; • Turut berperan dalam menghapuskan hambatan-hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hibah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu meningkatkan koordinasi penanggungjawab dan pelaksana hibah dengan pemerintah daerah; • Meningkatkan transparansi dan good governance dalam pengelolaan hibah, untuk menjaga reputasi pemerintah terhadap Donor/Pemberi Hibah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Sekretariat di BNPB sedang disiapkan

Pada rapat perdana Tim Pengarah TK-PHPB telah disampaikan 7 (tujuh) arahan Ketua Tim Pengarah yang akan menjadi acuan bagi penyesuaian rencana kerja pada Triwulan IV-2020 dan Rencana Kerja tahun 2021, yaitu:



III- **Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat di BNPB**

Pengelolaan dan penguatan Sekretariat di BNPB erat kaitannya dengan rencana transisi IMDFF-DR menjadi IDMF. Status pengelolaan dan penguatan Sekretariat di BNPB pada Triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Status pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
Payung hukum Sekretariat di BNPB	Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dalam keadaan <i>status quo</i> sejak Triwulan I-2020 karena SK Sestama BNPB Nomor 99.A/2019; 99.b/2019 dan SK Sestama BNPB Nomor 165.A/2019) tentang pelaksanaan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dan Penetapan Personil Pelaksana Sekretariat IMDFF-DR telah berakhir masa berlakunya pada Tahun Anggaran 2019	SK MPPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB) digunakan sebagai acuan penyusunan payung hukum pembentukan Sekretariat TK-PHPB di BNPB
Organisasi Sekretariat TK-PHPB di BNPB	Sekretariat TK-PHPB di BNPB belum terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB mengidentifikasi keanggotaan Sekretariat TK-PHPB sesuai fungsi dan peran IDMF
Sumber pendanaan kegiatan TK-PHPB	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan Proyek ENSURE-UNDP (pembiayaan UN Window) sampai dengan Desember 2020 masih diproses UNDP • Situs IMDFF-DR belum diperbarui dengan informasi IDMF/TK-PHPB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi sumber potensial lainnya untuk dilaporkan kepada Tim Teknis Tim Pelaksana TK-PHPB • Melakukan persiapan untuk sosialisasi IDMF kepada mitra pembangunan dan pemerintah daerah

Deskripsi	Status pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun bahan publikasi tentang IDMF/TK-PHPB 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan persiapan bagi migrasi situs IMDFF-DR ke BNPB

IV- Perkembangan Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR

Saat ini hibah-hibah yang sedang berjalan dan dikoordinasikan oleh IMDFF-DR adalah Proyek ENSURE dan Proyek PETRA dengan implementing agency UNDP dan executing agency BNPB. Berikut disampaikan ringkasan capaian pelaksanaan hibah-hibah tersebut, sebagai berikut:

1. Proyek Proyek Enhancing the IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post-Disaster Recovery Governance (ENSURE)

Aspek	Status pada Triwulan III-2020	Rekomendasi untuk Triwulan III-2020
Pelaksanaan Rapat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Rapat Teknis Tim Inti secara Virtual dalam pembahasan materi rapat Tim Pengarah Terlaksananya Rapat Teknis secara Virtual tentang Video Pembahasan materi Resmob TK-PHPB 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan materi Rapat Advisory Board Meeting Proyek PETRA setelah terbitnya SK MPPN tentang TK-PHPB dan terbentuknya sekretariat di BNPB yang akan disampaikan Kepada Ketua Tim Pengarah dan Wakil Ketua Tim Pengarah. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis TK PHPB pembahasan materi video Resmob.

Aspek	Status pada Triwulan III-2020	Rekomendasi untuk Triwulan III-2020
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Rapat Teknis terkait penomoran asset UNDP yang sudah di handover ke sekretariat di Lt.16 Graha BNPB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan FGD Series secara virtual tentang keberlanjutan dan penguatan serta peralihan IMDFF-DR kepada TK-PHPB.
Penguatan Sekretariat IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya perpanjangan penugasan Tenaga teknis pendukung Sekretariat untuk mendukung tugas Sekretariat TK-PHPB • Tenaga Teknis Pendukung berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dalam mendorong pembentukan Sekretariat TK-PHPB di BNPB 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan penugasan Tenaga teknis pendukung Sekretariat untuk mendukung tugas Sekretariat TK-PHPB • BNPB mengusulkan nama Kelompok Kerja (Pokja) untuk sekretariat TK-PHPB di BNPB. Karena bersifat kegiatan koordinasi.
Publikasi dan Sosialisasi	Tersusunnya materi rapat Tim Pengarah sebagai bagian dari materi sosialisasi SK MPPN tentang TK-PHPB	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian materi situs IMDFF-DR menjadi IDMF/TK-PHPB. • Koordinasi bersama Pusdatinkom dalam rangka persiapan untuk migrasi situs IMDFF-DR/ IDMF ke BNPB

Aspek	Status pada Triwulan III-2020	Rekomendasi untuk Triwulan III-2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan penyusunan bahan sosialisasi IDMF dan TK-PHPB
Monev dan Pelaporan	Penyampaian Laporan Triwulan II - 2020 proyek ENSURE melalui Rapat Tim Pengarah TK-PHPB yang disampaikan oleh Ketua Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan TK-PHPB Triwulan IV-2020 kepada Tim Pelaksana TK-PHPB • Mengevaluasi laporan proyek PETRA dan memberikan masukan bagi BNPB selaku Executing Agency

2. Proyek Sulawesi-Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

No	Lokasi	Kegiatan	Status pada Triwulan III-2020	Rencana Triwulan IV-2020
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Output 1: Rekonstruksi 13 unit infrastruktur publik (1 puskesmas, 8 pustu dan 4 SMKN)	Proses tender konstruksi telah selesai dan persiapan kontrak dengan pemenang tender.	Koordinasi persiapan pelaksanaan konstruksi.

No	Lokasi	Kegiatan	Status pada Triwulan III-2020	Rencana Triwulan IV-2020
		<p>Output 2: Pemulihan infrastruktur komunitas pendukung mata pencaharian.</p>	<p>DED telah rampung dan telah dikonsultasikan dengan masyarakat, pemerintah lokal dan mitra UNDP untuk infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Desa Geggelang, Desa Geggelang (Waserda)-NTB • Jaringan Pipa Air Bersih-Birisan Nangka, Sambik Elen-NTB • Irigasi Orong Sempade, Desa Sajang, Sembalun-NTB <p>UNDP bersama Mitra CSO telah menyusun panduan untuk rekonstruksi infrastruktur masyarakat yang terintegrasi dengan protokol pencegahan COVID-19.</p>	<p>Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan fisik.</p>
2.	Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Output 1: Rekonstruksi 27 infrastruktur publik (2 rumah sakit, 2 puskesmas,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Paket Rumah Sakit Anutapura dan RS Torabelo Sigi: Proses tender konstruksi telah selesai dan 	<p>Koordinasi persiapan pelaksanaan konstruksi.</p>

No	Lokasi	Kegiatan	Status pada Triwulan III-2020	Rencana Triwulan IV-2020
		21 sekolah dan 2 tempat pengolahan sampah/TPA)	<p>persiapan kontrak dengan pemenang tender.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paket TPA Kawatuna dan TPA Donggala: Tahapan evaluasi penawaran dari bidder. • Paket 2 Puskesmas dan 21 Sekolah: DED telah rampung dan proses persiapan tender konstruksi. 	
		Output 2: Pemulihan infrastruktur komunitas pendukung mata pencaharian.	DED infrastruktur komunitas telah rampung dan telah dikonsultasikan dengan masyarakat, pemerintah lokal dan mitra UNDP. Pembangunan jembatan gantung Tuva telah mulai dilaksanakan.	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan fisik.
	Rekomendasi kepada executing agency		Diperlukan rekomendasi persetujuan pelaksanaan kegiatan output 2 kegiatan PETRA yang sudah berjalan dan meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan PETRA-UNDP di NTB dan Sulteng.	

V- Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Lainnya

Beberapa kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengelolaan Hibah lainnya yang dikoordinasikan oleh TK-PHPB/IDMF diantaranya:

1. Rencana hibah baru dari Pemerintah Qatar (berdasarkan Surat Kedubes Qatar tanggal 5 Juli 2019 kepada KEMENLU RI) untuk pemulihan di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (sebesar USD 5.000.000);
2. Rencana hibah baru dari Pemerintah New Zealand (berdasarkan Surat Kedubes Selandia Baru tanggal 14 Februari 2019 kepada Ketua Tim Pengarah IMDFF-DR di BAPPENAS) untuk pemulihan di Sulawesi Tengah (sebesar NZD 1.480.000)

Kedua rencana hibah baru tersebut menyetujui untuk pemanfaatan kapasitas IMDFF-DR dalam melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan hibah pascabencana. Adapun ringkasan kegiatan koordinasi selama Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Aspek	Status pada Triwulan III-2020	Rekomendasi untuk Triwulan IV-2020
Koordinasi Sekretariat IMDFF-DR bersama Biro HOK, Direktorat PRR BNPB dan Direktorat terkait lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Rapat Koordinasi Internal melalui undangan Biro HOKS di BNPB terkait pembahasan Surat Rekomendasi dari BAPPENAS kepada BNPB pada 8 September terkait percepatan pemanfaatan Hibah Qatar.	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya penyerahan List Proyek Prioritas dan penentuan pelaksana Hibah Qatar oleh BNPB, sebagaimana Permintaan Pemerintah Qatar sesuai Nota Diplomatik Kedubes Qatar kepada Kemenlu.• Pelaksana rencana penandatanganan MoU Hibah Qatar sehingga dapat dimulai pada awal tahun 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> Hibah NZMFAT di suspend sementara pandemi Covid-19 oleh Kedubes NZ di Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan Koordinasi dengan NZMFAT di Jakarta setelah status suspend proyek dicabut.
Reviu substansi usulan calon Pemberi dan pelaksana Hibah	Bappenas melalui surat 8 September telah merekomendasikan Palang Merah Qatar sebagai pelaksana di lapangan mengingat Qatar Charity sudah ada MoU dengan Kemenag	Tanggapan dari BNPB dalam penetapan pelaksana Hibah dan penyampaian list proyek prioritas.
Penandatanganan perjanjian hibah	Pada 8 September 2020 Bappenas mengeluarkan rekomendasi agar dapat dilaksanakan pada Triwulan IV-2020	Dilaksanakan pada Triwulan IV-2020 sebagaimana rekomendasi Bappenas
Registrasi Naskah Perjanjian Hibah oleh Executing Agency	Belum terlaksana karena pandemi COVID-19	Dilaksanakan setelah penandatanganan MoU

VI- Koordinasi Internal dan Pelaporan

Selama Triwulan III (Juli- September) Tahun 2020 telah dilaksanakan rapat sekretariat secara virtual dan tatap muka dengan jadwal, agenda dan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
1	8 Juli 2020, Biro HOKS melaksanakan Rapat Internal Pembahasan Tindak Lanjut Percepatan Hibah Qatar	Pada tanggal 16 Juli 2020, Biro HOKS BNPB menanggapi Surat Bappenas. Menindaklanjuti Surat Dir DTTP, tanggal 6 Maret 2020, dapat disampaikan sbb: (1) Tindak lanjut kemitraan QFD & BNPB sesuai surat BNPB 21 Oct 2019 belum dapat dilaksanakan karena pembahasan MoU masih berlangsung; (2) Merujuk Surat Dirjen Aspas Kemenlu 28 Nov 2019, QFD berkeinginan menunjuk Qatar Chariry & Palang Merah Qatar sebagai implementing agency, dimana QC telah bermitra dengan KemenAgama; (3) PP 59/2016 ormas WNA, izin prinsip hanya bisa bermitra dengan 1 kementerian; sehingga tidak bisa bermitra dengan BNPB; (4) Apabila hibah QFD berupa barang dan jasa, maka BNPB akan bantu BAST dan register tetap di KemenAgama; (5) Usulan agar kegiatan RR di NTB&Sulteng dikoordinasikan dengan Kedeputusan RR.
2	16 Juli 2020, Pemberian Nomor Aset UNDP yang telah di hand over kepada sekretariat	Diharapkan setelah pemberian nomor asset, kepala sekretariat yang baru akan melanjutkan untuk di BAST asset bersama Biro Umum BNPB
3	4-6 Agustus 2020, Konsinyering Virtual/ Online Tim Inti dan Penasehat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Draft Revisi Rencana Kerja Sekretariat IMDFF-DR/ IDMF; • Masukan dan Arahan dari Tim Penasehat terhadap Draft Revisi Rencana Kerja Sekretariat IMDFF-DR/ IDMF;

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
	Sekretariat IMDRR-DR, bersama BNPB, UNDP dan Bappenas.	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Sosialisasi SK Tim Koordinasi IDMF (PHPB) di BNPB dan Bappenas; • Masukan dan Arahan dari Tim Penasehat terhadap Materi Sosialisasi SK Tim Koordinasi IDMF (PHPB) di BNPB dan Bappenas; • Rencana Persiapan Advisory Board Meeting (ABM) PETRA dan PBM ENSURE; • Rencana Sosialisasi IDMF di BNPB dan Bappenas.
4	27 Agustus 2020 (Virtual/ Online), Pembahasan awal Video animasi sebagai materi Resmob TK-PHPB, bersama UNDP, Tenaga teknis pendukung sekretariat dan Konsultan Impro	Konsultan Impro akan menyerahkan materi storyline video animasi pada akhir Agustus 2020, kemudian untuk diberi masukan dari Tim Inti sekretariat, kemudian akan diproduksi draft awal. Pembiayaan untuk konsultan dialokasikan dari dana UNDP-ENSURE.
5	27 Agustus 2020, Pelaksanaan Rapat Tim Pengarah TK-PHPB/ IDMF secara Virtual/ Online. Agenda: <ul style="list-style-type: none"> • Sesi Pembukaan, terdiri dari: Pengantar dari Ketua Tim Pengarah; Sambutan dari Wakil Ketua Tim 	<ul style="list-style-type: none"> • Adapun 7 point arahan dari Tim Pengarah adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan penetapan personil Sekretariat TK-PHPB di BNPB serta dukungan APBN tahun 2020, dalam pembentukan sekretariat dapat dirinci lebih lanjut tentang kriteria, peran dan mekanisme kerja masing-masing personil sekretariat;

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
	<p>Pengarah; dan Sambutan dari Anggota Tim Pengarah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesi Diskusi dan Pembahasan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Ketua Tim Pelaksana: Ringkasan Laporan IMDFF-DR s/d Triwulan II Tahun 2020; Gambaran Transisi/ Peralihan IMDFF-DR menjadi IDMF; Sosialisasi SK MPPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana. 2. Rencana pembentukan Sekretariat TK-PHPB di BNPB, Oleh Sekretaris Tim Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan sosialisasi TK-PHPB kepada mitra pembangunan bilateral dan multilateral, serta untuk K/L dan Pemda, dilaksanakan setelah pembentukan dan penetapan personil sekretariat; 3. Percepatan pelaksanaan pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah melalui Proyek PETRA KfW-UNDP yang sudah berjalan; 4. Percepatan proses pipeline hibah Penanggulangan Bencana dari Qatar (USD 5 Juta) untuk pemulihan di NTB dan Sulteng, serta New Zealand (NZD 1,5 juta) untuk kegiatan penguatan kapasitas di Sulteng; 5. Mobilisasi potensi sumber hibah penanggulangan bencana lainnya, sesuai mandat TK-PHPB, termasuk konsolidasi hibah PB on-going serta mobilisasi terhadap potensi sumber hibah baru; 6. Penyusunan Rencana Kerja TA 2020 dan 2021, sesuai RPJMN 2020-2024 dan Renas PB 2020-2024, serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terkait; dan 7. Sinkronisasi fasilitas pembiayaan PB dengan Disaster Pooling Fund dan DRFI (disaster risk financing and insurance)

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
	3. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut	BNPB, Bappenas, Kementerian Keuangan (Sekretariat dan Tim Pelaksana) dapat mengacu agenda kerja dan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Arahan Tim Pengarah.
6	8 September 2020, Penyiapan materi Rekomendasi Surat Bappenas kepada BNPB untuk Pemanfaatan Hibah Qatar Fund for Development untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah	Rekomendasi untuk Percepatan Pemulihan melalui Hibah Qatar di NTB&Sulteng: (1)BNPB agar bermitra dengan Qatar Red Crescent, karena Qatar Charity sudah bermitra dengan Kemenag; (2)mendukung peran BNPB membantu proses Registrasi dan BAST di K/L lainnya jika terkait PB; (3) BNPB menjadi perwakilan GoI yang akan bertanda tangan di MoU dengan Pemerintah Qatar; (4)Kedeputian RR BNPB agar menyiapkan List proyek prioritas sesuai permintaan Qatar sesuai R3P NTB dan Sulteng; (5)Implementasi harapannya dimulai Triwulan IV Tahun 2020, sejalan amanat Rapat Tim Pengarah 27 Agus 2020 dan sejalan dengan RPJMN 2020-2024.

VII- Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Triwulan IV-2020

Kesimpulan pelaksanaan rencana kerja IMDFF-DR pada Triwulan III-2020 dan rekomendasi tindak lanjut untuk Triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

No	Pelaksanaan pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
I	Transformasi IMDFF-DR menjadi IDMF/Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana	
	Status IMDFF-DR setelah terbentuknya IDMF, mengingat UN Window masih mempunyai kewajiban pelaporan pemanfaatan sisa dana Pemerintah New Zealand pada Proyek ENSURE	Tim Pengarah IDMF/TK-PHPB perlu menyepakati tindaklanjut terhadap MoU IMDFF-DR
	Menindaklanjuti arahan Tim Pengarah TK-PHPB pada rapat tanggal 27 Agustus 2020	Penyesuaian agenda Triwulan IV-2020 dan penyusunan rencana kerja TK-PHPB tahun 2021
2	Pengelolaan Sekretariat di BNPB	
	Sekretariat TK-PHPB di BNPB belum terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan dan penetapan personil Sekretariat TK-PHPB di BNPB serta dukungan APBN tahun 2020 • Pelaksanaan sosialisasi TK-PHPB kepada mitra pembangunan bilateral dan multilateral, serta untuk K/L dan Pemda, dilaksanakan setelah pembentukan dan penetapan personil sekretariat;
	Situs IMDFF-DR belum diperbarui dengan informasi IDMF/TK-PHPB	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan melengkapi materi sosialisasi IDMF • Updating situs IMDFF-DR • Mempersiapkan migrasi situs IMDFF-DR dari Bappenas ke BNPB
	Memantau proses Prodoc Extension ENSURE UNDP	<ul style="list-style-type: none"> • Segera menyelesaikan penandatanganan Prodoc Extension ENSURE

No	Pelaksanaan pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Handover Asset dari Proyek ENSURE kepada BNPB selaku Executing Agency
3	Perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah yang dikoordinasikan IMDFF-DR	
	Perpanjangan proyek ENSURE sampai dengan Desember 2020 masih diproses di UNDP	Penandatanganan ENSURE Project Document Extension
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pelaksanaan Project PETRA dilaksanakan Executing Agency secara virtual. • Pelaksanaan kegiatan PETRA mengalami keterlambatan sehubungan dengan pandemic covid-19. Kegiatan output 1 di NTB sudah dalam tahapan penentuan pemenang dan persiapan dokumen kontrak. Kegiatan di Sulteng: Paket 2 rumah sakit di Sulawesi Tengah sudah masuk tahap penentuan pemenang dan persiapan dokumen kontrak; Paket TPA Kawatuna dan TPA Donggala dan tahapan evaluasi penawaran dari bidder dan Paket 2 Puskesmas dan 21 Sekolah: DED telah rampung dan proses persiapan tender konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pelaksanaan pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah melalui Proyek PETRA KfW-UNDP yang sudah berjalan; • Melanjutkan pemantauan pelaksanaan kegiatan Project PETRA pada Triwulan III-2020 • Fasilitasi dan koordinasi dengan executing agency agar menyampaikan tanggapan terkait permohonan persetujuan usulan kegiatan output 2 Proyek PETRA dari UNDP.

No	Pelaksanaan pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan kegiatan output 2 di NTB dan Sulteng sudah masuk tahapan pembangunan fisik untuk infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasar Desa Ganggalang, Desa Ganggalang (Waserda)-NTB ○ Jaringan Pipa Air Bersih-Birisan Nangka, Sambik Elen-NTB ○ Irigasi Orong Sempade, Desa Sajang, Sembalun-NTB ○ Jembatan Tuva, di Kabupaten Sigi, Sulteng. 	
4	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Lainnya	
	Fasilitasi proses penerimaan hibah pipeline dari Pemerintah Qatar dan New Zealand	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses pipeline hibah Penanggulangan Bencana dari Qatar (USD 5 Juta) bagi pemulihan di NTB dan Sulteng, serta New Zealand (NZD 1,5 juta) bagi kegiatan penguatan kapasitas di Sulteng; • Mobilisasi potensi sumber hibah penanggulangan bencana lainnya, termasuk konsolidasi hibah PB on-going • Mobilisasi terhadap potensi sumber hibah baru

No	Pelaksanaan pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari peluang koordinasi dengan pengelola pembiayaan penanggulangan bencana lainnya
5	Koordinasi Internal dan Pelaporan	
	<p>Pelaksanaan rapat Tim Pengarah TK-PHPB pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan agenda utama Sosialisasi SK MPPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.72/M.PPN/HK/07/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti arahan Tim Pengarah • Menelaah potensi pendanaan untuk mendukung system Kesehatan nasional, perlindungan sosial dan ketahanan bencana • Menelaah potensi pendanaan untuk berkontribusi dalam perbaikan data pemerintah daerah yang akan bermanfaat bagi penanggulangan bencana alam dan non-alam; • Menelaah potensi pendanaan untuk mendukung penanganan Covid 19
	<p>Penyusunan Agenda rapat Tim Pelaksana TK-PHPB yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan sekretariat di BNPB • Pembahasan rencana kerja tahun 2021 • Persiapan bahan dan jadwal sosialisasi IDMF/TK- PHPB • Pembahasan agenda resmob 	<p>Penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana TK-PHPB, selambat-lambatnya pada minggu pertama Oktober 2020.</p>

No	Pelaksanaan pada Triwulan III-2020	Rekomendasi Untuk Triwulan IV-2020
	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sumber pendanaan kegiatan TK- PHPB 	
	Penyusunan Laporan Triwulan III-2020	Penyampaian Laporan Triwulan III-2020 pada awal Oktober 2020

VIII- Laporan Keuangan Proyek ENSURE Triwulan III Tahun 2020 dalam rangka mendukung kegiatan Sekretariat IMDFF-DR

Dengan pertimbangan bahwa Proyek ENSURE dengan UNDP selaku Implementing Agency adalah sumber pendanaan kegiatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB. Adapun sisa dana hingga akhir Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 sebesar USD 38.352, bersama ini disampaikan status keuangan per 30 September 2020 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini:

JOINT PROJECT BUDGET*								
Total Resources for the transfer (US\$)		203,626						
% of Indirect Costs		7						
Total Indirect Costs		14,254						
Total Direct Costs		189,372						
PROJECT BUDGET		ESTIMATED UTILIZATION OF RESOURCES (US\$)			Total Budget	Expenditure as of 30 September 2020	Commitment as of 30 September 2020	Balance
CATEGORY	Remaining Balance from MPTF	Remaining Balance from WB Trust Fund						
1	Staff and other personnel costs		80,000.00	80,000.00	65,391.59	7,449.18	7,159.23	
2	Supplies, Commodities, Materials	60,000.00		60,000.00	49,876.49	0	10,123.51	
3	Equipment, Vehicles and Furniture including Depreciation	10,000.00		10,000.00	12,285.58	-	(2,285.58)	
4	Contractual Services			-			-	
5	Travel	24,673.00	11,625.86	36,298.86	13,025.30	-	23,273.56	
6	Transfers and Grants to Counterparts			-			-	
7	General Operating and Other Direct Costs	10,010.18		10,010.18	6,490.24		3,519.94	
Total Programme Costs		104,683.18	91,625.86	196,309.04	147,069.20	7,449.18	41,790.66	
8	Indirect Support Costs**	7,316.82		7,316.82	10,754.70		(3,437.88)	
TOTAL Pass-Through Amount Approved		112,000.00	91,625.86	203,625.86	157,823.90	7,449.18	38,352.78	

Sumber : UNDP Indonesia, September 2020